

**HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA  
UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
(M.H)



Oleh:

DONY PUTRA SETIAWAN

NIM: 156010100111003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

## RINGKASAN

Dony Putra Setiawan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. dan Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.

Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh sering terjadinya benturan kewenangan antara penyidik Kepolisian RI dengan Kurator menyangkut permasalahan sita terhadap benda yang menjadi obyek yang sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit? Dan (2) Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?.

Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka diperoleh bahwa akibat putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum, sehingga segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus, sehingga berdampak pada penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama untuk kepentingan penyidikan. Benturan kewenangan dalam melakukan sita sering terjadi, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pengaturan sita.

## ***SUMMARY***

Dony Putra Setiawan, Master Degree of Law Science Major, Law Faculty of Brawijaya University, August 2017, *HARMONIZATION OF CRIMINAL CONFISCATION REGULATIONS AGAINST GENERAL CONFISCATION AS A RESULT OF BANKRUPTCY VERDICT*, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. dan Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.

In this thesis, the authors raised the issue regarding the Harmonization of Criminal Confiscation Regulations Against General Confiscation as a Result of Bankruptcy Verdict. The choice of the theme was based on the frequent occurrence of clash of authority between Police investigators with curators concerning confiscation of objects that are the same object.

Based on the above, the authors raised the following problem formulation: (1) What is the legal implication of the regulation of criminal sanction against the public confiscation as a result of the Bankruptcy Verdict? And (2) How to harmonize the regulation of criminal sanction against public confiscation as result of Bankruptcy Verdict ?.

This thesis used research method with normative law research type, with a statutory research, a conceptual, and a case approach. The types and sources of legal materials used, namely primary and secondary law material obtained through literature study and internet searching. Analysis of legal materials was done by grammatical interpretation and systematic interpretation.

Through the results and discussion in this thesis research, it was obtained that due to the Bankruptcy Verdict, the entire property of the bankrupt debtor is in general confiscation, so that all the determination of the implementation of the court before the commencement of bankruptcy should be stopped immediately and become null, thus impacting the confiscation by the investigator of the bankruptcy property being the same object for the purpose of investigation. Conflicts of authority in confiscation are frequent, so harmonization of confiscation arrangements is necessary.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini terlebih lagi bisa menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum ini dengan segala baik.

Ada ungkapan terima kasih yang ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Istislam, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing Utama untuk ilmu, bimbingan, kesabaran, dan motivasi.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk ilmu, bimbingan, kesabaran, dan motivasi.
5. Yang terkasih kedua orang tua, Felix Soekarno Almarhum dan Ety Hertiyuningsih Almarhumah yang telah mendidik dan memberikan dukungan serta motivasi dalam belajar semasa hidupnya kepada penulis.
6. Yang terkasih keluarga dan anak-anak penulis Daffa Almer Syahreza dan Davina Alzena Levia yang selalu menghibur dan menjadi motivasi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Yang terkasih Ekaputria Pitoy yang penulis cintai yang selalu memberikan kasih sayang serta nasihat-nasihat kepada Penulis dengan keikhlasan dan penuh ucapan syukur.
8. Bapak Bok, Hany Soegeng Bagio yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
9. Bapak Dr. Akbp Maruli Siahaan, S.H.,M.H, yang saat ini menjabat sebagai Wadir Kriminal dan Reserse Umum Polda Sumatera Utara yang juga telah

memberikan bimbingan dan motivasinya untuk menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap agar tulisan dalam tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para praktisi hukum.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong dan memberkati kita semua.

Malang, 20 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Kemanfaatan .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Definisi Konseptual.....	23
G. Orisinalitas Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26
I. Desain Penelitian .....	28

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Harmonisasi Hukum.....	29
1. Pengertian Harmonisasi Hukum .....	29
2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum.....	30
3. Fungsi Harmonisasi Hukum .....	30
4. Substansi Harmonisasi Hukum .....	31
B. Hukum Kepailitan .....	31
1. Pengertian Kepailitan .....	32
2. Tujuan Kepailitan.....	34
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	35
4. Tugas dan Kewenangan Kurator.....	39
C. Sita.....	43
1. Pengertian Sita .....	43
2. Sita Dalam Hukum Kepailitan.....	44
3. Sita Dalam Hukum Acara Perdata .....	45
4. Sita Dalam Hukum Acara Pidana .....	46
5. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	47

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Implikasi Hukum Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Terhadap	
---	--

Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	49
1. Pengaturan Sita Pidana di Pasal 39 ayat (2) KUHAP.....	49
2. Pengaturan Sita Umum di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU .....	56
3. Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Menurut KUHAP Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	66
B. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	75
1. Klasifikasi Hukum.....	75
2. Hukum Acara Pidana Sebagai Bagian Dari Hukum Publik.....	79
3. Hukum Kepailitan Sebagai Bagian Dari Hukum Privat .....	84
4. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	87
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	97
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	Halaman 78
--------------	---------------